

**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Pada SKPD di Kota Bandung Tahun 2018)**

Anisa Rahmawati¹⁾, Sri Rahayu²⁾
Universitas Telkom

ABSTRACT

This time, people need a relevant and transparent information relating to the results of programs that have been planned or implemented by the government. Because of the information and disclosure, both the central government or the regional government have to able to be the subject of the information provider on the activities and financial performance that needed accurately, relevantly, on time, consistently, and reliably. This study aims to determine how the effect of budget goal clarity and accounting controls both simultaneously and partially to Performance Accountability of Government Agencies on Government Work Units of Bandung City. The method of data collection is done by distributing questionnaires. The population of this study is Government Work Units of Bandung City as many as 43. The sampling technique used was a saturated sampling technique so that the sample of this study was 43 Heads of Bandung City Government Work Units. Data were analyzed by descriptive statistical analysis, classic assumption test, hypothesis test and multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics 23 software. The results show that budget goals clarity and accounting controls simultaneously influence to Performance Accountability of Government Agencies on Government Work Units of Bandung City. Partially, only budget goals clarity that influence the Performance Accountability of Government Agencies on Government Work Units of Bandung City. Based on the results of this study, the Government Work Units of Bandung City are expected to be able to maintain and always improve the quality of the Government Agency Performance Accountability Report so that it can show that the APBN data usage is well.

Keywords: *Village original income (VOI), Village funds (VF), Village balance funds allocation (VBFA), Village expenditures.*

1. Pendahuluan

Sejak era reformasi, masyarakat Indonesia telah maju menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang (Yulianti). Menurut Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No. 14 tahun 2008 menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pengelolaan pemerintah daerah yang akuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategik dalam rencana dan

tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Cefrida, kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut didapatkan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015-2016. Penggunaan anggaran hingga Rp 392,87 triliun tersebut dinilai tak efisien karena tidak ada kejelasan hasil yang dicapai, ukuran kinerja yang tidak jelas, tidak ada kaitan antara kegiatan dengan sasaran, hingga rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah pengendalian akuntansi. Berdasarkan SAS No. 48 pada tahun 1984 tentang definisi Pengendalian Intern, Pengendalian Akuntansi, meliputi struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayai catatan keuangan perusahaan, oleh karena pengendalian ini disusun sehingga dapat memberikan keyakinan. Dalam hal ini yang termasuk dalam pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Menurut Abdullah (2005) dalam Anjarwati dalam konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepala daerah kepada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya mendapatkan dua hal penting dalam menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Pertama, mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Kedua, penggunaan sistem

pengendalian akuntansi memungkinkan kepala SKPD membuat keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa Pemerintah masih menghadapi beberapa permasalahan. Selain itu juga, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

2. Kerangka Pemikiran

Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Keberhasilan manajemen instansi pemerintah yang diperlihatkan oleh tingginya akuntabilitas kinerja, akan tercapai, salah satunya melalui kejelasan sasaran anggaran. Ketika kejelasan sasaran anggaran baik, pemerintah dapat mengetahui dengan jelas apa yang akan mereka lakukan sehingga pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan lancar dan membuat akuntabilitas kinerja menjadi baik.

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan tidak adanya pedoman dan acuan dalam bekerja.

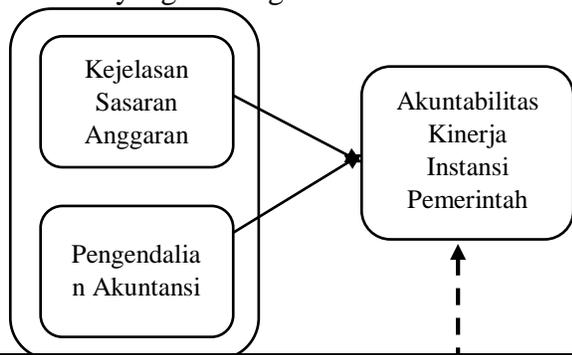
Implikasi pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara

kelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat.

Hubungan Pengendalian Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi untuk membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi pemerintah membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien. Sistem pengendalian berkaitan dengan sistem perencanaan, sistem pelaporan dan sistem monitoring yang didasarkan pada informasi.

Sistem akuntansi yang efektif merupakan syarat untuk kinerja yang lebih baik sehingga kegagalan menggunakan informasi akuntansi yang diperlukan mengakibatkan manajemen sumber daya yang tidak efektif serta kemunduran secara perlahan-lahan dalam kinerja instansi pemerintah. Semakin baiknya penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan mendorong pengambilan keputusan secara lebih baik. Selain itu, semakin baik prosedur pengendalian akuntansi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika suatu instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal diharapkan dengan praktik yang sehat, maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan.



Dari hasil kerangka pemikiran diatas, dapat disimpulkan hipotesis sementara dari penelitian ini, sebagai berikut:

- H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- H₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- H₃ : Pengendalian Akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode Penelitian

Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung yang terdiri dari 43 SKPD. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda. Persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi, n = 1,2 dan 3

X₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran

X₂ : Pengendalian Akuntansi

e : Epsilon atau Variabel control

4. Pembahasan Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif variabel penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penilaian atau tanggapan responden dilakukan dengan membuat kategori. Hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Persentase	Kategori
Kejelasan Sasaran Anggaran	1935	1731	89,5%	Sangat Baik
Pengendalian Akuntansi	3225	2887	89,5%	Sangat Baik
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3010	2652	88,1%	Sangat Baik

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS Statistics 23 (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berada pada kategori yang sangat baik karena persentase yang ditunjukkan berada pada interval $\geq 84\%$ - 100%.

Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 2
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12,749	7,741		1,647	,107
Kejelasan Sasaran Anggaran	,572	,285	,375	2,011	,029
Pengendalian Akuntansi	,386	,192	,376	2,013	,051

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS Statistics 23 (2018)

Berdasarkan output pada tabel diatas didapat nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,749 + 0,572X_1 + 0,386X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,749 menunjukkan bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi bernilai nol, maka nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 12,749.
2. Koefisien regresi sebesar 0,572 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kejelasan sasaran anggaran, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,572.

- Koefisien regresi sebesar 0,386 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pengendalian akuntansi, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,386.

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (dependen). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel bebas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kejelasan Sasaran Anggaran	,353	2,834
Pengendalian Akuntansi	,353	2,834

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS Statistics 23 (2018)

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel bebas tidak memiliki hubungan multikolinearitas. Hal itu karena nilai *tolerance* dari variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) dan variabel pengendalian akuntansi yaitu 0,353 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 2,834 yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian tidak terdapat hubungan antara variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) dan pengendalian akuntansi (X2).

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali [5] uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

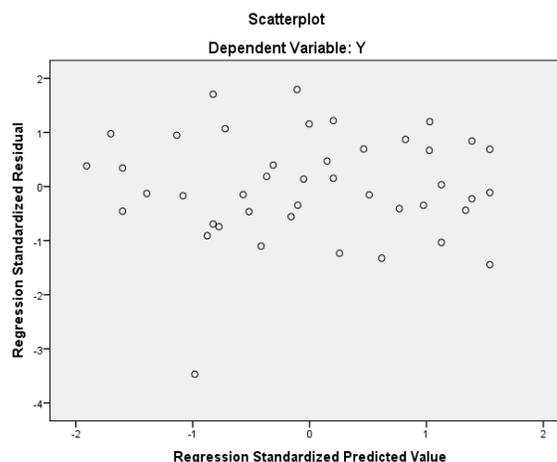
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	,713 _a	,509	,484	3,75135	1,284

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS Statistics 23 (2018)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai DW adalah 1,284, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 43 dan jumlah variabel independen (k) = 2, maka didapatkan nilai tabel $d_1 = 1,4151$ dan $d_2 = 1,6001$. Maka dapat disimpulkan bahwa



Sumber: Data Primer yang telah diolah
IBM SPSS Statistics 23 (2018)

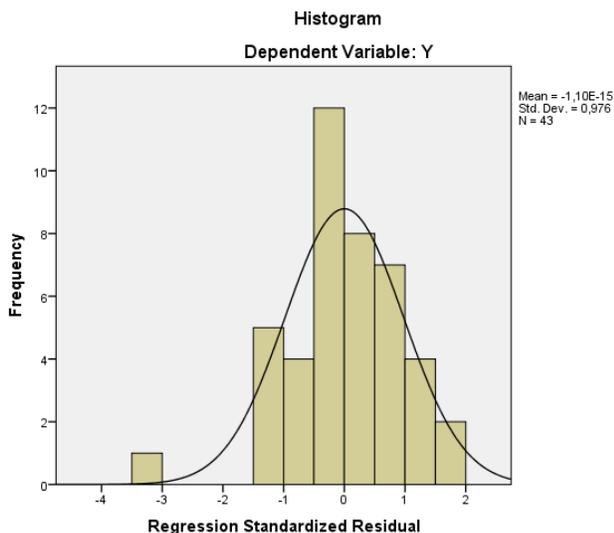
Gambar 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

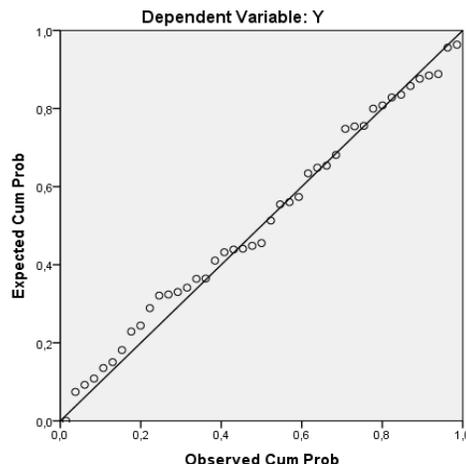
Pada gambar hasil uji heteroskedastisitas, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai untuk memprediksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) berdasarkan masukan bvariabel independen kejelasan sasaran anggaran (X1) dan pengendalian akuntansi (X2).

Uji Normalitas

Menurut Ghozali uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer yang telah diolah
IBM SPSS Statistics 23 (2018)

Gambar 2

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat terlihat bahwa penyebaran data memiliki pola distribusi yang mengikuti pola lonceng. Sehingga dapat dikatakan bahwa grafik histogramnya mengikuti pola distribusi normal. Selain itu, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat diambil kesimpulan jika model regresi memenuhi asumsi normalitas dan distribusi dapat dikatakan normal.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Mo del	R	R Squar e	Adjuste d R Square	Std. Error of the Estim at e
1	,713 ^a	,484	,509	3,75135

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS Statistics 23 (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,509 atau 50,9%. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel independen (bebas) yaitu kejelasan sasaran anggaran (X1) dan pengendalian akuntansi (X2) mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 50,9%. Sedangkan sisanya sebesar 49,1% (100%-50,9%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Pengujian Simultan

Menurut Ghozali [5] uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

Tabel 6
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	582,538	2	291,269	20,698	,000 ^b
Residual	562,904	40	14,073		
Total	1145,442	42			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah IBM SPSS Statistics 25 (2018)

Pada tabel 3.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Hal

tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) dan pengendalian akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Pengujian Parsial

Menurut Ghozali [5] uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh variable-variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12,749	7,741		1,647	,107
Kejelasan Sasaran Anggaran	,572	,285	,375	2,011	,029
Pengendalian Akuntansi	,386	,192	,376	2,013	,051

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS Statistics 23 (2018)

Pada tabel 3.7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada setiap variabel memiliki nilai yang berbeda. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) memiliki

nilai signifikansi sebesar 0,029. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($<0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) secara parsial berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Variabel pengendalian akuntansi (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,051. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($>0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal tersebut berarti bahwa pengendalian akuntansi (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Pembahasan Hasil Uji Penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.6, tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau di bawah 0,05 (5%) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi yang digambarkan pada tabel 4.50 menunjukkan bahwa Adjusted R Square adalah sebesar 0,509 (50,9%) yang berarti kedua variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi dapat mempengaruhi variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 50,9%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7 tingkat signifikansi kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 0,029 atau kurang dari 0,05 (5%) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung. Sehingga apabila kejelasan sasaran anggaran memiliki kualitas yang semakin baik, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung akan semakin baik.

Hasil analisis statistik deskriptif, tanggapan responden menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran pada SKPD Kota Bandung memiliki kualitas yang sangat baik dengan total skor 1731 atau 89,5%. Anggaran pada SKPD Kota Bandung memberi informasi yang jelas atas sasaran yang harus dicapai oleh instansi dengan skor tanggapan responden atas indikator jelas sebesar 589 atau 91,3%. Anggaran dibuat dengan sangat baik secara lebih spesifik dengan mempertimbangkan skala prioritas serta ditetapkan secara periodik dengan skor tanggapan responden atas indikator spesifik sebesar 580 atau 89,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata SKPD Kota Bandung dapat menetapkan anggaran yang spesifik, efisien dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kejelasan sasaran anggaran juga dapat dimengerti oleh rata-rata SKPD, tetapi terdapat 1 SKPD yang beranggapan bahwa anggaran sulit dimengerti. Walaupun demikian, anggaran pada SKPD Kota Bandung dapat dimengerti dengan sangat baik oleh sebagian besar SKPD Kota Bandung dengan skor tanggapan responden sebesar 562 atau 87,1%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrawati [3],

Anjarwati [1], Putra [7], Zakiyudin [11] dan Kaltsum [6] yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7, tingkat signifikansi pengendalian akuntansi adalah sebesar 0,051 atau lebih dari 0,05 (5%) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut berarti bahwa variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.

Hasil analisis statistik deskriptif pada poin 4.2.2.2, tanggapan responden menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi pada SKPD Kota Bandung memiliki kualitas yang sangat baik dengan total skor 2887 atau 89,5%. Adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan APBD pada SKPD Kota Bandung menyebabkan pengendalian organisasi berjalan sangat baik dengan skor tanggapan responden atas indikator pengendalian organisasi sebesar 374 atau 87%, meskipun beberapa SKPD memberikan tanggapan netral bahkan tidak setuju. Setiap aktivitas dan transaksi yang terjadi dicatat dan didokumentasikan serta dijaga agar tetap *up to date* dengan baik dengan skor tanggapan responden atas indikator pengendalian organisasi sebesar 598 atau 92,7%.

Selain itu, *hardware* dan *software* digunakan, diakses dan dikendalikan dengan baik serta dapat dioperasikan dengan mudah oleh penggunaanya dengan sangat baik dengan skor tanggapan responden atas indikator pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak sebesar 562 atau 87,1%. Pengendalian untuk melindungi aset dari

setiap instansi dilakukan oleh pihak berwenang dengan sangat baik dengan skor tanggapan responden atas indikator pengendalian keamanan fisik sebesar 384 atau 89,3%. Pengendalian keamanan data atas database dilakukan dengan sangat baik dengan skor tanggapan responden atas indikator pengendalian keamanan fisik sebesar 597 atau 92,6%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra [7], Herawaty [4] dan Anjarwati [1] yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Kejelasan sasaran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor tanggapan rata-rata sebesar 89,5%.
 - b. Pengendalian akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor tanggapan rata-rata sebesar 89,5%.
 - c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor tanggapan rata-rata sebesar 88,1%.
2. Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.
3. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

4. Pengendalian akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Anjarwati, Mei. (2012). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765.
- Cefrida S., M., Emrinaldi Nur DP, dan Mudrika Alamsyah Hasan. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Vol. 1 No. 2.
- Fitrawati, Abdul Kahar dan Muh. Ikbal A. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Universitas Tadulako. E Jurnal Katalogis, Vol. 5 No.12, 177-184. ISSN 2302-2019.
- Herawaty, Netty. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Universitas Jambi. Vol. 6 No. 2, 151-161. ISSN 1979-4851.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kaltsum, Ummu dan Abdul Rohman. (2013). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro. Vol. 1 No. 1. ISSN 2337-3806.
- Putra, Boby Arona. (2016). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD Bengkulu)*. Universitas Riau. JOM Fekon, Vol. 3 No. 1.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Yulianti, R., Hardi, dan Rusli. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)*. Universitas Riau. JOM FEKON Vol. 1 No. 2. ISSN 2355-6854.
- Zakiyudin, M. Ali dan Suyanto. (2015). *Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI*. Universitas Pancasila. Vol. 2 No. 1, 89-96. ISSN 2339-1545.